

PENGEMBANGAN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM DESA INKLUSI GUNA MEWUJUDKAN INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN SLEMAN

Oleh: UTAMI DEWI, NUR AZIZAH, PANDHU YUANJAYA

ABSTRAK

PENGEMBANGAN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM DESA INKLUSI GUNA MEWUJUDKAN INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN SLEMAN

Utami Dewi, Nur Azizah dan Pandhu Yuanjaya

Abstrak

Sebagai warga negara, penyandang disabilitas di Indonesia masih mendapatkan perlakuan yang kurang setara dengan warga negara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui capaian *collaborative governance* dalam implementasi Program Desa Inklusi di Kabupaten Sleman; 2) menghasilkan model *collaborative governance* yang efektif dalam implementasi Program Desa Inklusi dalam mewujudkan inklusi sosial di Kabupaten Sleman.

Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan desain penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis data secara kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi Program Desa Inklusi di Kabupaten Sleman. Data primer berupa hasil wawancara kepada informan penelitian dan observasi terhadap proses kolaborasi tata kelola pemerintahan dalam implementasi Program Desa Inklusi di Kabupaten Sleman. Sementara itu data sekunder diperoleh melalui dokumentasi proses dan capaian *collaborative governance* dalam implementasi Program Desa Inklusi di Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik analisis data menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi Program Desa Inklusi di Kabupaten Sleman telah tercipta kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi penyandang disabilitas dan sector swasta. Dalam kolaborasi kerjasama tersebut masing-masing pihak telah melaksanakan perannya sehingga inklusi sosial sudah mulai terwujud di Kabupaten Sleman. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif tercermin dari mulai kegiatan awal kolaborasi untuk mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, proses kolaborasi hingga upaya pencapaian inklusi sosial.

Kata Kunci: *collaborative governance, penyandang disabilitas, Program Desa Inklusi*